

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Amran dan Mardi, 2016, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Achmad Ichsan, 1986, *Dunia Usaha Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Budiono, 1992, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, PBFE, Yogyakarta.
- E. Fernando Manullang, 2017, *Legisme Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Galang Taufani Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta.
- H.M.N Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Handri Rahardjo, 2013, *Hukum Perusahaan(Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- JCT Simorangkir, 1983, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung.
- Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan*, Genta Publishing, Yogyakarta
- M, Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang Undangan Dasar dan Cara Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mustafa A Siregar, 1990, *Kapita Selektta Pengetahuan Hukum Dagang*, Ind Hill Co, Jakarta.

Ny. Siti Soemarti, 1993, *KUHD&PK*, Cetakan VII, Diterbitkan Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada , Yogyakarta.

Riduan Syahrini, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rudhi Prasetya, 2002, *Maatschap Firma Dan Persekutuan Komanditer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, UI-Press, Jakarta.

Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Subandi Al Marsudi, 2006, *Pancasila dan UUD ' 45 dalam Paradigm Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta.

Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

_____, 2014, *Hukum Dagang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendirian Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.

SUMBER LAINNYA

Bilal Dewansyah, 2020, *Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan*, Hukum Online, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan/>), Di akses pada 29 September 2020,2020).

Dewi Lestari, Tesis : *Peranan Notaris Dalam Pendirian CV Paska Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata*, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Dian Agung Wicaksana, 2013, “Implikasi dan Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia ”, Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. 1, Maret 2013.

Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, *Law and Social Review*, Volume 17 No 2. Dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Johannes Maryoto, 2020, *Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018*, Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Narotama Surabaya, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2020, Surabaya.

Indah Larasati, 2020, Tesis : *Kepastian Hukum Terhadap Nama Usaha Commanditer Vennotschap yang Sama Pasca Permenkumham No. 17 Tahun 2018 Tentang Pendirian CV*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Kemenkumham Kanwil Lampung, 2020, *Kemenkumham Lampung Gelar Sosialisasi Layanan AHU Tentang Pelaksanaan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018*, (<https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2592>), Diakses pada 19 September 2020, 2020).

Krisnadi Nasution, 2019, *Pendaftaran Commanditaire Vennotschap(CV) Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018*, Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya, Vol. 04, No. 01, Januari 2019, Surabaya.

Kumparan.com “DPR Ketok Prolegnas Prioritas 2021 di Paripurna Terdekat: RUU Minol hingga BPIP” (<https://kumparan.com/kumparannews/dpr-ketok-prolegnas-prioritas-2021-di-paripurna-terdekat-ruu-minol-hingga-bpip-1v2YeGgAo9d/full>, Diakses 24 Januari 2021, 2021)

Musa Lasakar, *Keabsahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya, Surabaya.

Naskah Akademik Tentang Rancangan Undang-Undang Badan Usaha.

Ni'matul Huda, 2006, *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Vol. 13 No. 1, Januari 2006.

Patuju La, *Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Serta Hubungan Diantara Ketiganya*, <http://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>, diakses tanggal 5 Januari 2020

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2020, *Perpres Beneficial Owner (BO), Upaya Cegah Korporasi Digunakan Oleh Pelaku Tindak Pidana*, (https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/775/perpres-beneficial-owner-bo-upaya-cegah-, Diakses pada 29 September 2020, 2020).

R. Tony Prayogo, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Retno Saraswati, 2009, “Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Media Hukum, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2009.

Sri Rumada Sihite, 2019, *Analisis Yuridis Atas Implementasi Pendaftaran Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschap) Secara Online Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata*(Studi Di Kota Medan, Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, Medan.

Web-Seminar Nasional Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas “Implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Serta Permasalahannya” Pada Tanggal 16 September 2020, Padang.

Yetty Komalasari Dewi, 2011, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD Dan Wvk Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia Dan Belanda*, Fakultas Hukum Program Doktoral Pascasarjana, Jakarta.